



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 56/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov - 032/V/TAHUN  
2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan berpedoman pada Peraturan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas , perlu ditetapkan dalam Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894 );
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik . ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189 );
  5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 );
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 24 /Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
14. Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 048/PB/04.00/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 perihal Balas Surat KPU Provinsi Papua Barat.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 41/BA/KPU.Prov-032/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov-032/VII/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017,**

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

**KEDUA** : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon Orang Asli Papua;

**KETIGA** : Bahwa dalam Waktu Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana pada Diktum Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tidak menyerahkan salinan Dokumen Persyaratan kepada Majelis Rakyat Papua Barat sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat langsung menyerahkan Salinan Dokumen persyaratan ke Majelis Rakyat Papua Barat, untuk mendapatkan persetujuan/pertimbangan orang asli papua;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 3 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

Ttd

**AMUS ATKANA**

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
 56 /Kpts/KPU.Prov-032/VIII/TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
 25 /Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016  
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017

| NO | KEGIATAN  | JADWAL           |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    |   | awal             | akhir            |
|    | PERSIAPAN   |                  |                  |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |                  | 22 Mei 2016      |
| 2. | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD )  |                  | 22 Mei 2016      |
| 3. | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN   |                  | 1 Oktober 2016   |
| 4. | SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS   | 30 April 2016    | 14 Februari 2017 |
| 5. | PEMBENTUKAN PPK/PPD, PPS DAN KPPS   |                  |                  |
|    | a. Pembentukan PPK/PPD dan PPS  |                  |                  |
|    | 1) Pembentukan PPK/PPD dan PPS  | 21 Juni 2016     | 20 Juli 2016     |
|    | 2) Perpanjangan Pembentukan PPK/PPD dan PPS   | 21 Juli 2016     | 30 Juli 2016     |
|    | b. Pembentukan KPPS   | 15 Nopember 2016 | 14 Januari 2017  |
| 6. | PEMANTAUAN PEMILIHAN  |                  |                  |
|    | a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 1 Juni 2016      | 14 Januari 2017  |
| 7. | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)  |                  |                  |
|    | a. Penerimaan DP4 dan DAK2  | 12 Juli 2016     | 15 Juli 2016     |
|    | b. Analisis DP4   | 16 Juli 2016     | 22 Juli 2016     |
|    | c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir   | 23 Juli 2016     | 12 Agustus 2016  |
|    | d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  | 13 Agustus 2016  | 16 Agustus 2016  |
|    | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4  | 18 Agustus 2016  | 18 Agustus 2016  |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  |                  |                  |
|    | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS   | 18 Agustus 2016  | 7 September 2016 |
|    | b. Pemutakhiran :   |                  |                  |
|    | 1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP  | 6 Agustus 2016   | 5 September 2016 |
|    | 2) Pencocokan dan penelitian  | 8 September 2016 | 7 Oktober 2016   |
|    | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran   | 8 Oktober 2016   | 21 Oktober 2016  |
|    | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kampung/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD/PPK | 22 Oktober 2016  | 24 Oktober 2016  |
|    | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Distrik dan penyampiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                                       | 25 Oktober 2016  | 26 Oktober 2016  |



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
 56 /Kpts/KPU.Prov-032/VIII/TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
 25 /Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016  
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017

| NO | KEGIATAN  | JADWAL           |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    |   | awal             | akhir            |
|    | PERSIAPAN   |                  |                  |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |                  | 22 Mei 2016      |
| 2. | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD )  |                  | 22 Mei 2016      |
| 3. | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN   |                  | 1 Oktober 2016   |
| 4. | SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS   | 30 April 2016    | 14 Februari 2017 |
| 5. | PEMBENTUKAN PPK/PPD, PPS DAN KPPS   |                  |                  |
|    | a. Pembentukan PPK/PPD dan PPS  |                  |                  |
|    | 1) Pembentukan PPK/PPD dan PPS  | 21 Juni 2016     | 20 Juli 2016     |
|    | 2) Perpanjangan Pembentukan PPK/PPD dan PPS   | 21 Juli 2016     | 30 Juli 2016     |
|    | b. Pembentukan KPPS   | 15 Nopember 2016 | 14 Januari 2017  |
| 6. | PEMANTAUAN PEMILIHAN  |                  |                  |
|    | a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 1 Juni 2016      | 14 Januari 2017  |
| 7. | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)  |                  |                  |
|    | a. Penerimaan DP4 dan DAK2  | 12 Juli 2016     | 15 Juli 2016     |
|    | b. Analisis DP4   | 16 Juli 2016     | 22 Juli 2016     |
|    | c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir   | 23 Juli 2016     | 12 Agustus 2016  |
|    | d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  | 13 Agustus 2016  | 16 Agustus 2016  |
|    | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4  | 18 Agustus 2016  | 18 Agustus 2016  |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  |                  |                  |
|    | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS   | 18 Agustus 2016  | 7 September 2016 |
|    | b. Pemutakhiran :   |                  |                  |
|    | 1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP  | 6 Agustus 2016   | 5 September 2016 |
|    | 2) Pencocokan dan penelitian  | 8 September 2016 | 7 Oktober 2016   |
|    | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran   | 8 Oktober 2016   | 21 Oktober 2016  |
|    | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kampung/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD/PPK | 22 Oktober 2016  | 24 Oktober 2016  |
|    | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Distrik dan penyampiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                                       | 25 Oktober 2016  | 26 Oktober 2016  |

| NO | KEGIATAN   | JADWAL            |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|
|    |  | awal              | akhir             |
|    | 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)                   | 27 Oktober 2016   | 2 Nopember 2016   |
|    | 7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)                         | 2 Nopember 2016   | 3 Nopember 2016   |
|    | 8) Penyampaian DPS kepada PPS  | 3 Nopember 2016   | 9 Nopember 2016   |
|    | 9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 10 Nopember 2016  | 19 Nopember 2016  |
|    | 10) Perbaikan DPS  | 20 Nopember 2016  | 24 Nopember 2016  |
|    | 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kampung/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPD/PPK                     | 25 Nopember 2016  | 27 Nopember 2016  |
|    | 12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Distrik/Kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                                       | 28 Nopember 2016  | 29 Nopember 2016  |
|    | 13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kampung/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                   | 28 Nopember 2016  | 29 Nopember 2016  |
|    | 14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):  |                   |                   |
|    | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT  | 30 Nopember 2016  | 6 Desember 2016   |
|    | b) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi   | 7 Desember 2016   | 8 Desember 2016   |
|    | c) Penyampaian DPT kepada PPS  | 7 Desember 2016   | 17 Desember 2016  |
|    | d) Pengumuman DPT oleh PPS   | 17 Desember 2016  | 15 Februari 2017  |
|    | PENYELENGGARAAN  |                   |                   |
| 1. | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  |                   |                   |
|    | a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan | 22 Mei 2016       | 22 Mei 2016       |
|    | b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan   | 20 Juli 2016      | 2 Agustus 2016    |
|    | c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:   |                   |                   |
|    | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh  | 3 Agustus 2016    | 7 Agustus 2016    |
|    | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran  | 3 Agustus 2016    | 9 Agustus 2016    |
|    | 3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda   | 4 Agustus 2016    | 17 Agustus 2016   |
|    | d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan kepada KPU /KIP Kabupaten / Kota   | 18 Agustus 2016   | 20 Agustus 2016   |
|    | e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS        | 21 Agustus 2016   | 23 Agustus 2016   |
|    | f. Penelitian faktual di tingkat kampung/kelurahan   | 24 Agustus 2016   | 6 September 2016  |
|    | g. Rekapitulasi di tingkat Distrik/Kecamatan   | 7 September 2016  | 9 September 2016  |
|    | h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota  | 10 September 2016 | 12 September 2016 |
|    | i. Rekapitulasi di tingkat provinsi  | 13 September 2016 | 15 September 2016 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON   |                   |                   |
|    | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon   | 14 September 2016 | 20 September 2016 |
|    | b. Pendaftaran Pasangan Calon  | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
|    | c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat   | 23 September 2016 | 29 September 2016 |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL            |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
|    |   | awal              | akhir             |
|    | d. Pemeriksaan kesehatan  | 21 September 2016 | 27 September 2016 |
|    | e. Penelitian syarat Bakal Calon sebagai Orang Asli Papua :   |                   |                   |
|    | 1) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat ( DPRPB ) untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon sebagai orang asli Papua | 26 September 2016 | 26 September 2016 |
|    | 2) DPRPB menyampaikan salinan dokumen Bakal Calon yang telah mendaftar di KPU Provinsi Papua Barat kepada MRPB  | 27 September 2016 | 28 September 2016 |
|    | 3) Penelitian dan/atau verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon oleh MRPB   | 27 September 2016 | 4 Oktober 2016    |
|    | 4) MRPB menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon melalui KPU Provinsi Papua Barat.   | 27 September 2016 | 4 Oktober 2016    |
|    | 5) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan pemberitahuan MRPB   | 27 September 2016 | 4 Oktober 2016    |
|    | 6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan administrasi kepada MRPB melalui KPU Provinsi Papua Barat.   | 27 September 2016 | 10 Oktober 2016   |
|    | 7) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan dokumen hasil perbaikan kepada MRPB  | 28 September 2016 | 10 Oktober 2016   |
|    | 8) MRPB melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan administrasi Bakal Calon  | 28 September 2016 | 16 Oktober 2016   |
|    | 9) MRPB menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua kepada KPU Provinsi Papua Barat  | 28 September 2016 | 16 Oktober 2016   |
|    | f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  | 27 September 2016 | 28 September 2016 |
|    | g. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik   | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
|    | h. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik   | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|    | i. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon  | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|    | j. Pemberitahuan hasil penelitian   | 29 September 2016 | 30 September 2016 |
|    | k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :  |                   |                   |
|    | 1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota   | 29 September 2016 | 1 Oktober 2016    |
|    | 2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan   | 1 Oktober 2016    | 3 Oktober 2016    |
|    | l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU  | 3 Oktober 2016    | 5 Oktober 2016    |
|    | m. Penelitian hasil perbaikan:  |                   |                   |
|    | 1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:  |                   |                   |
|    | a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran   | 29 September 2016 | 3 Oktober 2016    |
|    | b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda  | 29 September 2016 | 8 Oktober 2016    |
|    | c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPD/PPK   | 9 Oktober 2016    | 11 Oktober 2016   |



| NO | KEGIATAN  | JADWAL           |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    |   | awal             | akhir            |
|    | d) Penelitian faktual di tingkat Kampung /Desa /kelurahan                                     | 12 Oktober 2016  | 17 Oktober 2016  |
|    | e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Distrik /Kecamatan                                 | 18 Oktober 2016  | 19 Oktober 2016  |
|    | f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota                                     | 20 Oktober 2016  | 21 Oktober 2016  |
|    | g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi   | 22 Oktober 2016  | 23 Oktober 2016  |
|    | 2) Penelitian perbaikan syarat calon  | 4 Oktober 2016   | 10 Oktober 2016  |
|    | n. Penetapan Pasangan Calon   | 24 Oktober 2016  | 24 Oktober 2016  |
|    | o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon  | 25 Oktober 2016  | 25 Oktober 2016  |
| 3. | SENGKETA TUN PEMILIHAN  |                  |                  |
|    | a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten/Kota                  | 24 Oktober 2016  | 26 Oktober 2016  |
|    | b. Perbaikan permohonan sengketa  | 27 Oktober 2016  | 31 Oktober 2016  |
|    | c. Penyelesaian sengketa dan putusan  | 1 Nopember 2016  | 16 Nopember 2016 |
|    | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | 17 Nopember 2016 | 21 Nopember 2016 |
|    | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | 22 Nopember 2016 | 24 Nopember 2016 |
|    | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan                 | 25 Nopember 2016 | 16 Desember 2016 |
|    | g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | 17 Desember 2016 | 19 Desember 2016 |
|    | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | 16 Desember 2016 | 22 Desember 2016 |
|    | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | 23 Desember 2016 | 20 Januari 2017  |
|    | j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA     | 21 Januari 2017  | 23 Januari 2017  |
| 4. | KAMPANYE  |                  |                  |
|    | a. Kampanye   | 28 Oktober 2016  | 11 Februari 2017 |
|    | b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 28 Oktober 2016  | 11 Februari 2017 |
|    | c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik  | 29 Januari 2017  | 11 Februari 2017 |
|    | d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 12 Februari 2017 | 14 Februari 2017 |
| 5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   |                  |                  |
|    | a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)   | 27 Oktober 2016  | 27 Oktober 2016  |
|    | b. Pengumuman penerimaan LADK   | 28 Oktober 2016  | 28 Oktober 2016  |
|    | c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)                              | 20 Desember 2016 | 20 Desember 2016 |
|    | d. Pengumuman penerimaan LPSDK  | 21 Desember 2016 | 21 Desember 2016 |
|    | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ( LPPDK )                       | 12 Februari 2017 | 12 Februari 2017 |
|    | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik ( KAP )                                      | 13 Februari 2017 | 13 Februari 2017 |
|    | g. Audit LPPDK  | 13 Februari 2017 | 27 Februari 2017 |
|    | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota     | 28 Februari 2017 | 28 Februari 2017 |
|    | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon  | 1 Maret 2017     | 3 Maret 2017     |
|    | j. Pengumuman hasil audit   | 1 Maret 2017     | 3 Maret 2017     |
| 6. | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA                  |                  |                  |
|    | a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                            | 3 Nopember 2016  | 26 Januari 2017  |
|    | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                | 25 Nopember 2016 | 14 Februari 2017 |

| NO  | KEGIATAN   | JADWAL  |                         |
|-----|--|---|-------------------------|
|     |  | awal  | akhir                   |
| 7.  | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  |   |                         |
|     | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS   | 6 Februari 2017   | 12 Februari 2017        |
|     | b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS  | <b>15 Februari 2017</b>   | <b>15 Februari 2017</b> |
|     | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS  | 15 Februari 2017  | 21 Februari 2017        |
|     | d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS   | 15 Februari 2017  | 15 Februari 2017        |
|     | e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kampung/kelurahan   | 15 Februari 2017  | 21 Februari 2017        |
| 8.  | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  |   |                         |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPD/PPK   | 15 Februari 2017  | 17 Februari 2017        |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota  | 16 Februari 2017  | 22 Februari 2017        |
|     | c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur       | 22 Februari 2017  | 24 Februari 2017        |
|     | d. Rekapitulasi , Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 25 Februari 2017  | 27 Februari 2017        |
| 9.  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)  |   |                         |
|     | a. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  | 10 Maret 2017   | 12 Maret 2017           |
| 10. | SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)   | Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi  |                         |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan   |                         |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH   |   |                         |
|     | a. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  |   |                         |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP  | 11 Maret 2017   | 13 Maret 2017           |
|     | 2) Permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11                  |                         |
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN   |   |                         |
|     | a. Gubernur dan Wakil Gubernur   |   |                         |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP  | 14 Maret 2017   | 14 Juni 2017            |
|     | 2) Permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2 |                         |

ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd  
**AMUS ATKANA**

